

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2017 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu **Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu**.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 26.976.000,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 488.660.000,00 atau realisasi pendapatan sebesar 5,52 %

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp 8.594.271.105,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.988.129.368,00 atau mencapai 86,04 %.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 37.717.400.384,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 34.325.000,00 dan Aset Tetap (netto) berupa tanah sebesar Rp. 1.081.252.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.197.871.441,00 gedung dan bangunan sebesar Rp. 3.981.243.305,00 jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 3.825.405.963,00 dan Aset tetap Lainnya (netto) sebesar Rp. 10.535.150,00

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 202.518.454,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 16.943.170.210,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 26.976.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 8.109.723.172,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 8.082.747.172,00.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Maksud dan Tujuan
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Sistematika Penulisan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

	TARGET KINERJA
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Pencapaian Target Kinerja
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan pos-pos Neraca
BAB VI	P E N U T U P
LAMPIRAN	

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan diharapkan mampu dengan penyelenggaraan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2017 meliputi hal berikut

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki target dan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 141.100.000,00 Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan sebesar Rp. 11.700.000,00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 335.800.000,00

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang.

Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2017 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran OPD
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk kesejahteraan masyarakat perikanan
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

Penyusunan APBD Tahun 2017, disusun secara integrasi antara rencana kerja dan anggaran. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 7 Program dan 55 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.460.138.180,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 12 item kegiatan yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp. 786.949.000,- dengan realisasi anggaran Rp 679.642.579,- atau 86,36%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan sehingga memiliki umur ekonomis diatas rata-rata. Pagu anggaran Program ini Rp. 369.176.250,- dengan realisasi anggaran Rp 321.598.095,- atau 87,11%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu: pengadaan meubeler, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, dan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.

a. Pengadaan Mebeleur

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya mebeleur yang mendukung sarana kerja aparatur Dinas Perikanan, berupa pengadaan kursi eselon sebanyak 1 unit dan kursi rapat sebanyak 8 unit sehingga menambah nilai aset Dinas Perikanan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 18.400.000,- dengan realisasi 89,07%. Meskipun anggaran kegiatan ini tidak terealisasi 100 % namun capaian kinerja kegiatan tercapai 100 %.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan agar menambah nilai aset bangunan dan terpeliharanya gedung kantor Dinas Perikanan yaitu berupa rehab dapur, pemasangan terali besi, dan pembuatan plank merek kantor. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 78.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 78.470.000,- atau 99,46 %.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan, terdapat 5 unit kendaraan roda 4, 1 unit kapal, 1 unit escavator, dan 20 unit kendaraan roda 2.. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 271.876.250,- dengan realisasi anggaran Rp. 226.739.095,- atau 83,40%. Meskipun realisasi anggaran ini tidak terealisasi sebesar 16,60 % namun capaian kinerjanya tercapai 100 %. Hal ini disebabkan efesiensi dalam menggunakan BBM, pelumas dan suku cadang.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Ini bertujuan agar terdidik dan terlatihnya 6 (enam) orang aparatur pada Dinas Perikanan dalam hal pelatihan administrasi, pengelolaan keuangan, penataan aset dan pelatihan teknis lainnya. Pagu anggaran Program/Kegiatan ini sebesar Rp. 49.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 39.383.000 atau 78,84 %. Capaian kinerja kegiatan ini 100 %.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan agar tersedianya laporan kinerja dan keuangan yang akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memantau kegiatan di lapangan dan mengevaluasi output dan outcome dari kegiatan pada tahun berjalan dan berlalu, baik yang bersumber dari dana APBD murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Perbantuan (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 78.324.000,- dimana realisasi anggaran Rp. 52.360.700,- atau 66,85%. Meskipun anggaran kegiatan ini tidak teralisasi sebesar 33,15 %, namun capaian kinerja terealisasi 100 % dimana dapat dievaluasi kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan informasi pengelolaan potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Selatan

sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan. Untuk mencapai tujuan program tersebut, program ini memiliki pagu anggaran Rp 2.966.880.000,- dengan realisasi Rp 2.862.964.250,- atau 96,50% dan didukung oleh beberapa kegiatan berikut ini:

a. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK 2017)**

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.342.705.750,- dengan realisasi keuangan Rp 1.340.607.400,- atau 99,84%. Meskipun kegiatan terlaksana dengan baik namun target kinerja cuma tercapai 67 % disebabkan pada awal tahun anggaran diprediksi dengan anggaran tersedia tersentuh 12 KUB, namun kenyataannya tersentuh sebanyak 8 KUB. Hal ini disebabkan 4 KUB belum memenuhi syarat dalam menerima paket bantuan. Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk belanja hibah sarana prasarana penangkapan dalam rangka pemberdayaan nelayan yaitu :

- 1). Pengadaan Perahu Jukung sebanyak 26 unit yang dihibahkan kepada Koperasi Nelayan Tanjung Samudera sebanyak 2 Unit, Koperasi nelayan Beringin Sakti 3 Unit, Koperasi Nelayan Jaya Bersama 2 Unit, Koperasi Nelayan Saiyo Mangko Manjadi 5 Unit , Koperasi Nelayan Sampan Dayuang 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangun Bersama 10 Unit. Koperasi Nelayan Bina Jaya Bersama 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangkit Bersama 2 Unit.
- 2) Pengadaan Mesin Tempel 5 PK sebanyak 34 unit dan dihibahkan kepada Koperasi Nelayan Tanjung Samudera sebanyak 2 Unit, Koperasi nelayan Beringin Sakti 3 Unit, Koperasi Nelayan Jaya Bersama 2 Unit, Koperasi Nelayan Saiyo Mangko Manjadi 5 Unit , Koperasi Nelayan Sampan Dayuang 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangun Bersama 16 Unit. Koperasi Nelayan Bina Jaya Bersama 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangkit Bersama 4 Unit.
- 3) Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring monofilament) sebanyak 260 piece dimana masing-masing unit terdiri dari 10 piece yang dihibahkan kepada Koperasi Nelayan Tanjung Samudera sebanyak 2 Unit, Koperasi nelayan Beringin Sakti 3

Unit, Koperasi Nelayan Jaya Bersama 2 Unit, Koperasi Nelayan Saiyo Mangko Manjadi 5 Unit , Koperasi Nelayan Sampan Dayuang 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangun Bersama 10 Unit. Koperasi Nelayan Bina Jaya Bersama 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangkit Bersama 2 Unit.

- 4) Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan (Serok) sebanyak 32 Unit dan dihibahkan kepada Koperasi Nelayan Tanjung Samudera sebanyak 2 Unit, Koperasi nelayan Beringin Sakti 3 Unit, Koperasi Nelayan Jaya Bersama 2 Unit, Koperasi Nelayan Saiyo Mangko Manjadi 5 Unit , Koperasi Nelayan Sampan Dayuang 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangun Bersama 16 Unit. Koperasi Nelayan Bina Jaya Bersama 1 Unit, Koperasi Nelayan Bangkit Bersama 2 Unit.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 1.072.694.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.044.872.250,-. Dengan target kinerja sebanyak 7 KUB terealisasi 100 %. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masyarakat / kelompok nelayan, yaitu pengadaan Mesin Long Tail 5 Pk sebanyak 36 Unit dan dihibahkan 10 unit untuk KUB kape-kape Laut dan 10 unit KUB Muatiara Laut dan 16 Unit untuk KUB Pasir Putih Painan Timur, Mesin Tempel 15 Pk untuk Koperasi Nelayan Bangun Bersama sebanyak 1 Unit, dan KUB Pancing Riak Gelombang sebanyak 16 Unit dan 1 unit untuk KUB Riak Gelombang dan 1 Unit untuk KUB Pasir Putih Painan Timur, Mesin Tempel 40 PK sebanyak 6 unit untuk KUB Mitra Nelayan sebanyak 1 unit, KUB Pancing Riak Gelombang sebanyak 3 Unit, Koperasi Nelayan Bangun Bersama sebanyak 2 Unit.

c. Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak Tanah Nelayan (SEHAT) Tahun 2017

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat nelayan, dimana sertifikat tanah nelayan tersebut nantinya dapat diagunkan ke Bank untuk menambah modal melaut. Dari 100 persil sertifikat tanah nelayan yang ditargetkan, hanya

sebesar 50 persil yang terealisasi. Hal ini dikarenakan bahan administrasi pengurusan sertifikat nelayan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan BPN.

Pagu anggaran sebesar Rp. 29.866.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.802.250,- atau 89,74%.

- d. **Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil**
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan yang didanai dari APBD, seperti identifikasi calon penerima manfaat, survei harga, operasional belanja barang, dan sebagainya. Anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 64.020.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 56.839.000,- atau 88,78% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- e. **Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan**
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan pelaku usaha perikanan. Sebelum dilakukan pelatihan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada 75 KUB tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Dari 75 KUB tersebut, 4 KUB diikutkan magang tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan ke Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 70.562.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.207.000,00 atau sebesar 92,28 % dengan capaian kinerja 100 %.
- f. **Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kecil**
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 75 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.667.000,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 42.474.500,- atau 82,21 %. KUB yang dibina berada pada Kecamatan Koto XI Tarusan sampai Pancung Soal. Dari 75 KUB, beberapa KUB diantaranya berhasil dibina dengan baik, terbukti sebanyak 20 KUB menjadi Koperasi namun perlu pembinaan lebih lanjut tentang administrasi keuangannya sehingga koperasi menjadi aktif. Cara yang harus dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para pengurus koperasi nelayan yang ada.

g. Pro Gerakan Anti Kemiskinan (Pro-GAKIN)

Kegiatan ini bertujuan untuk merubah pola pikir nelayan sehingga dengan memberdayakan para nelayan agar keluar dari anggapan bahwa nelayan itu identik dengan kemiskinan. Pro Gakin merupakan program penyuluhan guna membangun perekonomian nelayan . 8 Nilai yang mesti dimotivasi dalam gerakan anti kemiskinan nelayan adalah

- Semangat dalam bekerja
- Jujur Dalam Berusaha
- Hemat dalam berbelanja
- Tabungan Harus Ada
- Pendidikan untuk keluarga
- Kesehatan harus dijaga
- Lingkungan tetap dipelihara
- Kepedulian terhadap sesama.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 72.813.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.442.500,00 atau sebesar Rp. 81,64 %. Dari penyuluhan yang dilakukan serta telah dilakukan uji coba pada tahun 2016 yang ternyata ditemui permasalahan bahwa merubah prilaku nelayan untuk menerapkan 8 nilai pro gakin tersebut masih sangat sulit. Apalagi memotivasi untuk menyimpan sebahagian penghasilan. Namun Pro Gakin ini pada tahun 2018 nanti akan digerakan disemua instansi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Pusat dan Propinsi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.007.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 64.429.400,- atau 92,03%. Kegiatan ini berupa pendampingan verifikasi dan identifikasi calon penerima paket, penyerahan barang hibah, dan rapat-rapat kerja di Provinsi. Pencapaian target kinerja sebesar 80 % ditentukan banyaknya paket yang dialokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

i. Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisaikan pada masyarakat perikanan akan peluang-peluang modal usaha untuk menjalankan

aktifitasnya para nelayan. Seperti Kredit Usaha Rakyat yang dapat diakses oleh para nelayan baik di BRI, BNI dan BPD. Dalam hal ini, para nelayan akan mendapat pendampingan dalam mengakses kredit tersebut oleh Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPB MU) yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan sesuai dengan aturan Bank masing-masing. Pada tahun 2017, hampir lebih kurang 1 Milyar para pelaku usaha perikanan mendapatkan modal usaha melalui perbankan.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.313.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.297.000,00 atau 85,38 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

j. Pendampingan Asuransi Nelayan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi program pusat Asuransi Nelayan. Program asuransi nelayan merupakan santunan bagi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan di Laut dengan kriteria :

1.	Kecelakaan Dilaut dan Meninggal Dunia	:	200.000.000,-
2.	Kecelakaan di Laut dan Cacat tetap	:	100.000.000,-
3.	Biaya Pengobatan bagi nelayan	:	20.000.000,-
4.	Kematian Alami	:	160.000.000,-

Pada tahun 2017, keluarga ahli waris yang mendapat santunan asuransi nelayan sebanyak 14 orang dimana ke 14 orang nelayan yang mendapatkan Biaya Premi Asuransi Nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana jenis klaim Asuransi Nelayan tersebut Kematian alami dimana Jumlah santunan bagi nelayan sebanyak Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) masing-masing Ahli Waris dari nelayan yang meninggal dunia. Jumlah nelayan yang mendapat kartu asuransi nelayan sebanyak 1.562 dari tahun 2016 sampai dengan 2017.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.62.875.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.029.600,00 atau sebesar Rp. 93,88 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

k. Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 95.254.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.963.350,00 atau sebesar 77,65 %. Target kinerja sebanyak 75 KUB namun baru tercapai 60 KUB atau 80 %. Kegiatan ini perlu dilanjutkan mengingat semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang diperbarui ditambah lagi dengan kewenangan Kabupaten yang telah beralih ke Pemerintah Provinsi.

6. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan target produksi pada tahun 2017 sebesar 14.354 ton dengan realisasi produksi 12.714 ton atau tercapai sebesar 88,57 %. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016 maka meningkat sebesar 4,15 %. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2017 maka tidak tercapai produksi sebesar 11,43 %. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 2.607.529.430,- dengan realisasi anggaran Rp.1.787.313.317,- atau 68,54% yang terdiri dari 19 kegiatan diantaranya

a. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan

Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok Painan dapat beroperasi dan memproduksi menghasilkan pakan yang berkualitas baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan harga yang relatif rendah.

Selama tahun 2017, Pabrik Pengolahan Pakan Ikan tidak beroperasi dengan maksimal karena kondisi mesin yang tidak mendukung operasional dan juga bangunan pabrik yang kurang baik. Komposisi pakan yang dihasilkan belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini disebabkan SDM petugas Pabrik Pengolahan Ikan yang masih kurang menunjang dalam menjalankan tugas mencetak pakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu pelatihan dalam rangka peningkatan SDM. Untuk mengantisipasi banyaknya persoalan dalam operasional pabrik pakan maka dilaksanakan pengadaan mesin pembuat pakan

sebanyak 3 unit. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 100.271.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 78.566.431,- atau 78,35%. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100 % artinya beroperasi namun tidak menghasilkan pakan sesuai dengan target yang diharapkan.

b. Operasional BBI Pincuran Boga

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 181.296.000,- dengan realisasi keuangan Rp 154.610.936,- atau 85,28% dan realisasi fisik 85,28%. Kegiatan ini bertujuan agar beroperasi BBI Pincuran Boga. BBI Meskipun BBI beroperasi dengan baik namun capaian kinerja yaitu menghasilkan benih berkualitas serta target PAD sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak tercapai. Hal ini disebabkan benih yang dihasilkan disetiap pemijahan kurang berkualitas karena induk jantan yang kurang unggul dan SDM petugas BBI perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi kekurangan pakan hidup seperti budidaya cacing sutera, curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kematian benih selama pendederan. Perlu kajian yang lebih mendalam untuk pengadaan induk jantan dan induk betina jenis lele mutiara guna menunjang kinerja BBI Pincuran agar biaya operasional yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah benih yang dihasilkan.

c. Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya

Kegiatan penunjang DAK bidang perikanan budidaya bertujuan untuk menunjang kegiatan DAK tahun 2017 dibidang perikanan budidaya, yaitu survei harga dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DAK. Pagu anggaran kegiatan ini berjumlah Rp 101.866.800,- dengan realisasi Rp 84.421.723,- atau 82,87% dan capaian kinerja sebesar 75 %. Hal ini disebabkan 1 paket pekerjaan yang bersumber DAK tidak terealisasi.

d. Penanganan Hama dan Penyakit Ikan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 61.883.500,- dengan realisasi Rp. 45.934.780,- atau 74,23%. Dalam hal penanganan Hama dan Penyakit Ikan, SDM petugas perlu ditingkatkan lagi mengingat para pembudidaya disaat terjadi kasus penyakit ikan kesulitan untuk menanganinya sementara petugas perikanan juga terbatas kemampuannya dalam hal ini. Pada tahun 2017, penanganan hama dan penyakit yang tertangani sebanyak 3 kasus penyakit jamur.

- e. **Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR)**
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 15 UPR, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.856.350,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 31.738.000,- atau 93,74% dengan capaian kinerja sebesar 86,67 %. Dari 15 UPR yang ada, maka tahun 2017 hanya 13 UPR yang aktif. Diperlukan pembinaan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017, tidak ada satupun UPR yang mendapatkan sertifikat CPIB sebagai legalitas untuk menjual benih berkualitas. Hal ini disebabkan sarana UPR yang belum menunjang proses pembenihan ikan yang baik, induk yang tidak unggul lagi.
- f. **Denfarm Bioflog Budidaya Lele (DAK)**
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 410.913.000,- dengan realisasi Rp. 410.913.000,- atau 100%. Capaian Kinerja 100 %. Pokdakan yang mendapatkan hibah dari kegiatan ini adalah : Pokdakan Farm Bioflog Titipan Illahi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Farm Bioflog Ar-Razzaq Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Mata Iwak kecamatan Lunang. Paket yang diberikan berupa benih, pakan, obat-obat dan sarana budidaya berupa kolam bundar. Sampai akhir tahun 2017, Farm Bioflog Titipan Illahi yang telah panen Tahap I sebanyak 1,3 ton, Pokdakan Farm Bioflog Mata Iwak telah panen tahap I sebanyak 1,7 Ton Ikan Nila dan lele dan Pokdakan Farm Bioflog Ar-Razzaq telah panen tahap I sebanyak 800 Kg.
- g. **Rehabilitasi Kantor BBI Pincuran Boga**
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 373.873.730,- dengan realisasi Rp. -. Adapun kegiatan ini tidak jadi terlaksana dikarenakan setelah dilakukan perhitungan kembali oleh Dinas PUPR ternyata dana tidak mencukupi meskipun rencananya dilaksanakan 2 tahap, namun untuk tahap I yang terealisasi hanya tiang bangunan sehingga nilai manfaatnya tidak dapat dihitung. Dan juga bangunan lama harus dibongkar sehingga harus membangun baru bukan rehabilitasi jenis pekerjaannya.
- h. **Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya**
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Budidaya yang

didanai dengan APBD sebesar Rp. 69.698.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 58.859.580,- atau 84,45%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Bantuan Pakan dan Benih (nila dan kerapu). Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas.

i. Denfarm Budidaya Rumput Laut (DAK)

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. -. Karena Kebun Rumput Laut yang didanai dari DTP gagal sehingga bibit RL yang semestinya dibeli dari kelompok Pembudidaya RL tidak tersedia.

j. Percontohan Budidaya Ikan Sistem Bioflog

Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 343.054.700,- dengan realisasi Rp. 330.820.405,- atau 96,43%. Kegiatan ini terdiri dari magang bagi pokdakan yang mendapat alokasi kegiatan Demfarm Bioflog Budidaya Lele (DAK) ke Depok sebanyak 3 orang pembudidaya dan 2 orang petugas BBI Pincuran Boga dan pembangunan instansi BBI Pincuran Boga di Carocok Painan. Tujuannya adalah tempat penelitian dan percobaan dalam pengembangan teknologi budidaya sistem bioflog. Dari anggaran yang tersedia untuk pembangunan instalasi BBI Pincuran Boga belum cukup sehingga dianggarkan lagi pada tahun 2018.

k. Sosialisasi Izin Usaha dan Identifikasi Usaha Perikanan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 55.158.000,- dengan realisasi Rp. 37.224.500,- atau 67,49%. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisaikan pada masyarakat perikanan akan pentingnya memiliki Izin Usaha. Ada 3 jenis izin usaha perikanan yaitu SIUP, SIPI dan SIKPI. Dari pelaksanaan kegiatan ini ditemui bahwa masih banyak pelaku usaha perikanan yang belum memahami dan memiliki izin usaha perikanan. Oleh karena itu sosialisasi intensif tentang izin usaha perikanan perlu dilanjutkan. Ditemui dilapangan masih banyak nelayan yg belum mengurus izin tersebut. Dikerenakan tidak pahamnya nelayan dlm pengurusan.

l. Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 52.746.200,- dengan realisasi Rp. 52.106.000,- atau 98,79%. Capaian kinerja sebesar 72 % disebabkan target yang terbina sebanyak 54 pokdakan dari 70 pokdakan yang terinventarisir. Hal ini disebabkan pokdakan tersebut tidak aktif lagi karena kurang modal, sarana dan prasarana.

m. Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan SDM pembudidaya ikan dalam melakukan budidaya ikan yang sesuai dengan SNI. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 19.753.200,00 dengan realisasi anggaran Rp. 15.808.200,00 atau 80,03 % dengan capaian kinerja 100 %. Melalui kegiatan ini terlatih 20 orang pembudidaya dengan harapan meningkatnya SDM dalam melaksanakan budidaya ikan dengan baik. Pada tahun 2017, pembudidaya yang mendapatkan sertifikat CBIB sebanyak 18 orang.

n. Pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu benih ikan dan meningkatkan SDM pelaku pembenihan sesuai dengan CPIB. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 18.400.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 10.744.200,00 atau 58,39% dengan capaian kinerja 100 %. Melalui kegiatan ini terlatihnya 20 orang pembenih. Diharapkan dengan pelatihan akan berkembang Unit Pembenihan Rakyat sebagai mitra BBI dalam menghasilkan benih untuk memenuhi kebutuhan benih masyarakat.

o. Demfarm Budidaya Udang Bersama Padi/Ugadi (DAK)

Kegiatan ini merupakan implemetasi dari magang yang diberikan kepada Pokdakan Tabek Indah yang dilakukan pada tahun 2016 ke BBAT Sukabumi. Melalui Dana Alokasi Khusus tahun 2017 Demfarm ini direalisasikan di lapangan. Akibat Pokdakan Tabek Indah belum sepenuhnya memahami tekhnis budidaya ini maka outcome yang diharapkan tidak tercapai meskipun output kegiatan terealisasi 100 %. Anggaran kegiatan ini adalah Rp 147.982.500,00,00 dengan realisasi Rp. 147.982.500,00 atau sebesar 100 %. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah ukuran benur yang diadakan terlalu kecil sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan sementara pengalaman dan pengetahuan pokdakan belum

maksimal sehingga kematian benur saat dipindahkan ke sawah sangat tinggi. Kedepannya pokdakan yang akan menerima bantuan ini meski pokdakan yang telah memiliki ilmu tentang budidaya ini, perhitungan terhadap musin tanam dengan penebaran benur di sawah perlu menjadi perhatian yang utama agar padi yang ditanam tidak terganggu dan benur yang berkembang tidak punah.

p. **Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ikan**

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 123.286.812,00 atau 82,19 % dengan capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini meliputi pengadaan mesin pencetak 1 unit, mesin pengaduk 1 unit, mesin penepung 1 unit. Pengadaan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan mesin di pabrik pakan Carocok Painan yang tidak berfungsi lagi dengan maksimal. Diharapkan dengan adanya mesin yang baik maka produksi pakan akan lebih meningkat.

q. **Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Perikanan Budidaya**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat pembudidaya, dimana sertifikat tanah pembudidaya tersebut nantinya dapat diagunkan ke Bank untuk menambah modal. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 48.627.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 16.897.500,00 atau 34,75 % dengan capaian kinerja 0,00 % karena tidak terbitnya sertifikat pembudidaya. Hal ini disebabkan tidak satupun berkas tanah pembudidaya yang memenuhi syarat untuk diterbitkannya sertifikat.

r. **Demfarm Budidaya Nila (DAK)**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 187.398.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 187.398.750,00 atau 100 %, Capaian kinerja sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari pengadaan benih dan pakan untuk 2 Pokdakan yaitu Pokdakan Baliak Parik di Kecamatan Batang Kapas dan Pokdakan Mata Air Indah di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

s. **Penyusunan Dokumen Potensi Budidaya Perikanan**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.700.000,00. Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan tidak ada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dalam pengadaan jasa konsultan Perencana.

7. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan produk perikanan yang berdaya saing dengan cara meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Target konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 36 Kg/Kap/Tahun dengan asumsi jumlah ikan yang dikonsumsi oleh penduduk Pesisir Selatan sebesar 40 % dari jumlah produksi. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 601.329.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 444.471.905,00 atau 73,91 %. Program ini didukung dengan 8 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Promosi dan Publikasi Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggaran kegiatan ini Rp. 127.429.400,00,00 dengan realisasi anggaran Rp. 105.830.579,00 atau 83,05 % dengan capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini bertujuan Memfasilitas pengusaha bidang perikanan, khususnya pengolah ikan untuk membantu pemasaran produk hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha bidang perikanan juga merupakan sebagai media informasi dan interaksi bisnis antara pemilik dan pengguna teknologi bidang usaha perikanan serta terpacunya pemerintah propinsi, kabupaten kota, pelaku bisnis industri perikanan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama didalam pengembangan industri perikanan

b. Gemar Makan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan, mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan. Ruang lingkup kegiatan ini terdiri dari : pelaksanaan lomba masak serba ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan lomba masak serba ikan Tingkat Provinsi hingga nasional, pelaksanaan lomba inovasi tingkat provinsi dan nasional. Anggaran Kegiatan ini Rp. 111.795.950,00 dan terealisasi Rp. 75.571.076,00 atau 67,60 % dengan capaian kinerja 100 %.

- c. **Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP**
Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 57.901.250,00 dengan realisasi anggaran Rp. 56.295.450,00 atau 97,23 % dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Capaian kinerja kegiatan ini 100 %.
- d. **Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi**
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 82.300.000,00 dengan realisasi Rp. 55.359.900,00 atau 67,27 %. Capaian Kinerja 100 %. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan SDM masyarakat terutama masyarakat yang berada dikawasan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, menambah nilai ekonomis juga sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menambah peluang usaha serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya diwilayah pesisir. Ruang lingkup kegiatan adalah : pelaksanaan pelatihan Kerang-kerangan dan pelatihan Aquascape.
- e. **Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan**
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 69.886.800,00 dengan realisasi Rp. 51.283.550,00 atau 73,38 % Capaian Kinerja 100 %. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha, meningkatkan peluang usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengembangkan produk hasil perikanan. Ruang lingkup kegiatan terdiri dari Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan yang dilakukan di 3 lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Ranah Pesisir Selatan.
- f. **Pembinaan Poklalsar Bidang P2HP**
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 65.477.000,00 dengan realisasi Rp. 57.470.900,00 atau 87,77 %. Capaian Kinerja 61,67 %. dari 60 poklalsar yang diinventarisir hanya 37 POKLAHSAR yang aktif dan sebagian sudah dalam bentuk badan hukum atau Koperasi untuk dilakukan pembinaan. 23 POKLAHSAR kurang aktif karena

disebabkan hasil tangkapan musiman dan kurangnya transparansi kelompok sehingga perlu adanya pembinaan lebih lanjut dalam peningkatan kelembagaan kelompok dan memberikan dorongan untuk diaktifkan lagi.

g. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 38.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 27.314.700,00 atau 71,13 % dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi penggunaan bahan berbahaya pada hasil perikanan, keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang produk hasil perikanan yang menggunakan bahan berbahaya, meningkatkan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah : pengambilan sampel yang dilakukan pada 15 kecamatan terhadap produk perikanan (ikan segar dan ikan olahan) dan pengujian kandungan formalin di Laboratorium.

h. Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 48.139.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.345.750,00 atau 31,88 %. Capaian kinerja 0 % disebabkan tidak adanya penyedia jasa yang sanggup melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang sangat kasif..

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

No	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA		TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN	REALISASI	
		TOTAL	TOTAL	
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.949.000	679.642.579	86,36
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.789.800	46.606.936	56,98
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.840.000	111.417.000	95,36
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66.661.000	66.661.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.485.000	20.485.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.100.000	37.085.000	99,96
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.731.000	28.731.000	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.500.000	6.500.000	100,00
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.100.000	72.244.601	96,20
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.680.000	6.617.000	39,67
10	Penyediaan makanan dan minuman	51.637.500	51.637.500	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.325.000	185.072.542	94,75
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90.099.700	46.585.000	51,70
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.176.250	321.598.095	87,11
1	Pengadaan Meubiler	18.400.000	16.389.000	89,07
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	78.900.000	78.470.000	99,46
3	Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	271.876.250	226.739.095	83,40
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.950.000	39.383.000	78,84
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	49.950.000	39.383.000	78,84
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	78.324.000	52.360.700	66,85
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	78.324.000	52.360.700	66,85
I	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.966.880.000	2.862.964.250	96,50
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan (DAK)	1.342.705.750	1.340.607.400	99,84
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.072.694.000	1.044.872.250	97,41
3	Pengembangan Akses Pemodal dan Sertifikat Hak Tanah Nelayan (Sehat) Tahun 2017	29.866.000	26.802.250	89,74
4	Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	64.020.000	56.839.000	88,78
5	Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan	70.662.500	65.207.000	92,28
6	Pembinaan KUB Nelayan Kecil	51.667.000	42.474.500	82,21
7	Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (Pro-GAKIN)	72.813.750	59.442.500	81,64
8	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	70.007.500	84.429.400	120,60
9	Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan	34.313.500	29.297.000	85,38
10	Pendampingan Asuransi Nelayan	62.875.500	59.029.600	93,88
11	Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan	95.254.500	73.963.350	77,65

II	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	2.607.529.430	1.787.313.317	68,54
1	Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan	100.271.000	78.566.431	78,35
2	Operasional Balai Benih Ikan Pincuran Boga	181.296.000	154.610.936	85,28
3	Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budi daya	101.866.800	84.421.723	82,87
4	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	61.883.500	45.934.780	74,23
5	Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat UPR	33.856.350	31.738.000	93,74
6	Denfarm Bioflog Budi daya Lele (DAK)	410.913.000	410.913.000	100,00
7	Rehabilitasi Kantor BBI Pincuran Boga	373.873.730	-	-
8	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budi daya	69.698.000	58.859.580	84,45
9	Denfarm Budi daya Rumput Laut (DAK)	200.000.000	-	-
10	Percontohan Budi daya Ikan Sistem Bioflog	343.054.700	330.820.405	96,43
11	Sosialisasi Izin Usaha dan Identifikasi Usaha Perikanan	55.158.000	37.224.500	67,49
12	Pembinaan Kelompok Pembudi daya Ikan (POKDAKAN)	52.746.200	52.106.000	98,79
13	Pelatihan Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB)	19.753.200	15.808.200	80,03
14	Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	18.400.200	10.744.200	58,39
15	Denfarm Budi daya Udang bersama Padi/UGADI (DAK)	147.982.500	147.982.500	100,00
16	Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ikan	150.000.000	123.286.812	82,19
17	Fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Perikanan Budi daya	48.627.500	16.897.500	34,75
18	Denfarm Budi daya Nila (DAK)	187.398.750	187.398.750	100,00
19	Penyusunan Dokumen Potensi Budi daya Perikanan	50.750.000	-	-
III	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	601.329.500	444.471.905	73,91
1	Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	127.429.400	105.830.579	83,05
2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	38.400.100	27.314.700	71,13
3	Kegiatan Gemar Makan Ikan (Gemarikan)	111.795.950	75.571.076	67,60
4	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP	57.901.250	56.295.450	97,23
5	Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	82.300.000	55.359.900	67,27
6	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	69.886.800	51.283.550	73,38
7	Pembinaan POKLAHSAR Bidang P2HP	65.477.000	57.470.900	87,77
8	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	48.139.000	15.345.750	31,88

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka mulai pada tahun 2017 ini, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual . Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik. Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.2.2. Neraca

Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Perikanan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin

- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Perikanan Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

a. Ekuitas Dana Lancar

- b. Ekuitas Dana Investasi
- c. Ekuitas Dana Cadangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2017 dinilai berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Secara detail mengenai aset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai Kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.846.485.921,0	2.406.537.259,00

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2017 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 2.406.537.259,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan	2.603.022.921,00	2.107.887.259,00
- Tambahan Penghasilan PNS	243.463.000,00	298.650.000,00
- Insentif Pemungutan Ret	00,00	00,00

Daerah

Jumlah Belanja Tidak	2.846.485.921,0	2.406.537.259,00
Langsung	0	00

2.	Belanja Langsung	5.329.377.405,0	6.187.733.846,00
-----------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Barang Modal. Sampai dengan Desember 2017 realisasi Belanja Langsung telah mencapai Rp. 6.187.733.846,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai

- Honorarium PNS	190.700.000,00	169.600.000,00
- Honorarium Non PNS	350.500.000,00	225.850.000,00
- Uang Lembur	0,00	40.590.000,00

Sub jumlah	541.200.000,00	436.040.000,00
		0

Belanja Barang/Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Bahan Pakai Habis	197.405.542,00	209.295.076,00
- Belanja Bahan/Material	159.405.500,00	139.034.641,00
- Belanja Jasa Kantor	399.001.753,00	116.596.436,00
- Belanja Perawatan	617.788.235,00	156.989.095,00

Kendaraan Bermotor		
- Belanja Cetak dan Penggandaan	60.148.100,00	72.769.000,00
- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	2.200.000,00	10.250.000,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	118.800.000,00	117.400.000,00
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.925.000,00	4.448.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	75.407.500,00	89.933.000,00
- Belanja Pakaian Kerja	5.837.519,00	18.275.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	1.045.133.966,00	1.023.806.115,00
		0
- Belanja Pemeliharaan	88.711.920,00	126.415.400,00
- Belanja Hibah Barang	496.045.000,00	3.118.383.650,00
		0
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.400.000,00	20.000.000,00
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.100.000,00	31.550.000,00
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.500.000,00	12.000.000,00
Sub Jumlah	5.329.377.405,00	5.267.145.913,00

Belanja Modal 5.351.558.000,- 484.547.933,00

Belanja Modal Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp. 484.547.933,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Motor Bermotor	322.027.600,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	17.441.600,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	138.837.800,00	123.286.812,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	52.791.000,00	29.822.726,00
- Belanja Modal Pengadaan alat rumah tangga	186.391.750,00	21.147.500,00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.432.000,00	15.491.500,00
- Belanja Modal Pengadaan meja & kursi kerja/Rapat Pejabat	0,00	16.139.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	32.500.000,00	17.085.375,00
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	496.900.000,00	258.578.020,00
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	59.385.000,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	118.269.600,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Buku	572.000,00	1.997.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Hewan	4.950.000,00	0,00
Sub Jumlah	1.434.367.350,0	484.547.933,0
	0	0
Jumlah Belanja Langsung	5.329.377.405,0	6.187.733.846,00
	0	00

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Saldo kas Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 0,- terdiri atas :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Jumlah	-	-

5.2.2 Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
1.	Aset Tetap	10.369.193.702,00	10.843.795.885,00
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 10.369.193.702,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.843.795.885,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Tanah	1.081.252.000,00	1.081.252.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.081.252.000,00 tidak ada terjadi mutasi tambah.		
	2. Peralatan Dan	9.989.438.103,0	10.197.871,441,0

Mesin	0	0
Dalam tahun 2017 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 208.433.338,00		
3. Gedung dan bangunan	3.778.159.677,0	3.981.243.305,00
Dalam tahun 2017 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 203.083.000,00	0	
4. Jalan Irigasi dan Jaringan	3.766.520.246,0	3.825.405.963,00
Dalam tahun 2017 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 58.885.717,00	0	
5. Aset Tetap Lainnya	8.538.150,00	10.535.150,00
Dalam tahun 2017 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 1.997.000,00		
6. Akumulasi Penyusutan	(8.254.714.474,0	(8.254.714.474,00)
	0)	

BAB VI PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan , Januari 2018
**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Ir. ARLINDAWATI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661028 199210 2 001

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG